Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-883

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU (STUDI KASUS DI JORONG SIKABAU KABUPATEN PASAMAN BARAT)

Deska Wulandari[1], Khoirul Asfiyak[2], Dzulfikar Rodafi[3]
Universitas Islam Malang
e-mail: [1]22101012002@unisma.ac.id, [2]Khoirulasfiyak@gmai.com,
[3]dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id

Abstract

The implementation of marriage in Minangkabau, especially in Jorong Sikabau, follows state law, Islamic law, and local customs. Minangkabau adheres to a matrilineal system, so the prohibition on marriage within the same tribe (kawin sasuku) is strictly guarded because it is considered to be one's descent from the mother's line. This prohibition aims to maintain the structure of customs and kinship, as well as prevent disruption in the social order and the potential loss of customary rights. Couples who violate this prohibition will be ostracized, lose their rights within the tribe, and be subject to customary sanctions such as fines or expulsion. According to national law and Islamic law, marriage within the same tribe is valid, but according to custom, it is still prohibited because it is considered to violate norms and can cause social conflict and stigma in society. This study aims to describe the implementation of the prohibition on intermarriage in Jorong Sikabau, the legal, economic, and social implications for violators, and the views of Islamic law on this prohibition. The method employed is a qualitative case study, utilizing both primary and secondary data, which is collected through observation and interviews with traditional, religious, government, and community leaders. The results of the study indicate that this prohibition remains strong, despite an increase in violations among young people due to social change, and customary sanctions continue to be enforced through deliberation.

Keywords: Islamic Law, Prohibitions, Marriage, Ethnicity

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah perjanjian formal dan ikatan suci antara pria dan wanita untuk menjadi suami istri, yang menyatukan dua keluarga dan budaya berbeda. Secara hukum, pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat hukum dan sesuai ajaran agama masing-masing. Pernikahan juga menjadi awal terbentuknya kehidupan baru dalam berumah tangga. Hukum pernikahan bisa menjadi sunah, wajib, makruh, atau haram tergantung kondisi dan alasan masing-masing individu. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (حاكنلا), adapula yang mengatakan

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. (Malisi, 2022)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hikmah perkawinan adalah membentuk ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membangun keluarga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. (Shamad, 2017)

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia tidak hanya mengikuti hukum negara dan hukum Islam, tetapi juga aturan adat setempat yang diwariskan turun-temurun. Setiap daerah memiliki tradisi dan larangan tersendiri, seperti adat Minangkabau yang melarang pernikahan sesuku karena mengikuti garis keturunan ibu. Dalam masyarakat Minangkabau, pernikahan harus sesuai syariat Islam dan adat, di mana semua keturunan dari nenek yang sama dianggap satu suku, sehingga tidak boleh menikah satu suku. Konsep perkawinan pantang dalam budaya Minangkabau adalah larangan menikah dengan sesama anggota suku (kawin sasuku), karena dianggap satu keturunan dari garis ibu (matrilineal). Larangan ini bertujuan menjaga struktur adat dan mencegah pernikahan antar saudara sedarah. Jika dilanggar, pelaku dapat dikenai sanksi adat, seperti dikucilkan dari masyarakat. (Herviani, 2019)

Apabila terjadi perkawinan sesuku di Minangkabau, akan menimbulkan masalah dan konsekuensi bagi pelaku serta risiko yang harus ditanggung. Larangan ini didasarkan pada beberapa alasan utama:1) Pelapor kerusakan dalam kaum, 2) Mempersempit pergaulan, 3) Kehilangan hak dalam adat. Aturan adat Minangkabau melarang pernikahan sesuku karena dianggap satu keturunan. Jika dilanggar, Wali Nagari bersama Ninik Mamak akan mengadili pelaku. Sanksinya bisa berupa pengusiran dari desa, pembubaran perkawinan, dikucilkan, atau denda sesuai keputusan adat. (Malik, 2018)

Penelitian ini penting dilakukan disebabkan perbedaan hukum pernikahan dalam hukum islam, hukum nasional, serta dalam hukum adat di Minangkabau. Pelarangan menikah sesuku di Minangkabau masih berlaku kuat di berbagai daerah, seperti di Jorong Sikabau, Pasaman Barat. Larangan ini didasarkan pada adat yang menganut sistem matrilineal dan eksogami, yaitu seseorang harus menikah dengan orang di luar sukunya untuk menghindari pernikahan sedarah dan menjaga kualitas keturunan. Jika larangan ini dilanggar, pelaku dan keluarganya akan menerima sanksi adat berupa pengucilan, pengusiran, kehilangan hak adat, hingga denda. Dampaknya, hubungan keluarga menjadi renggang, terjadi konflik berkepanjangan antara anak dan orang tua, serta antar keluarga kedua belah pihak.

Dalam Islam, tidak ada larangan menikah sesuku, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadist aturan yang melarang pernikahan sesuku. Larangan ini murni berasal dari adat Minangkabau, bukan dari ajaran agama. Penulis tertarik meneliti lebih dalam proses larangan perkawinan sesuku di Minangkabau menurut hukum Islam, sehingga permasalahan ini diangkat dalam skripsi berjudul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minang Kabau (Studi Kasus Di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat).

Dalam penelitian ini, terdapat tiga rumusan masalah utama yang akan dikaji secara mendalam. Pertama, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau di Jorong Sikabau, Kabupaten Pasaman Barat. Kedua, penelitian ini akan mengkaji implikasi yang timbul akibat pelanggaran larangan perkawinan sesuku, baik dari segi hukum adat, ekonomi, maupun sosial. Dalam hal ini, penelitian akan menelusuri berbagai konsekuensi yang diterima oleh pasangan yang melanggar, seperti sanksi adat berupa pengucilan, denda, hingga dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Ketiga, penelitian ini akan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap penerapan larangan perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau, khususnya di Jorong Sikabau. Aspek ini akan membahas bagaimana hukum Islam memandang larangan tersebut, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, serta bagaimana interpretasi para tokoh agama dan ulama terkait praktik adat ini dalam konteks keislaman masyarakat Minangkabau.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait permasalahan yang diteliti, serta membandingkan temuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Melalui perbandingan tersebut, peneliti dapat mengetahui aspek-aspek yang menjadi keunggulan maupun kelemahan, sehingga hasil penelitian dapat lebih maksimal. Sebagai bahan perbandingan, terdapat penelitian terdahulu yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan sesuku Di Masyarakat Minangkabau Di Kelurahan Manggis Ganting " yang dilakukan oleh Muhamad Rizky Setiawan pada tahun 2022. Hasil penelitian menyatakan bahwa bahwa larangan kawin sesuku di Minangkabau, khususnya di Kelurahan Manggis Ganting, berlaku baik menurut hukum Islam maupun adat. Pelaku perkawinan sesuku dikenai sanksi berupa pengusiran dari kampung dan denda yang ditetapkan oleh Ninik Mamak, dengan besaran denda menyesuaikan kondisi pelanggaran. Penelitian ini menemukan kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas larangan perkawinan sesuku. Namun, perbedaannya terletak pada fokus: penelitian ini menyoroti penerapan larangan dan sanksi dalam adat Minangkabau dari perspektif hukum Islam, sedangkan skripsi Muhammad Rizky Setiawan lebih menitikberatkan pada pemaparan sanksi yang diterima pelaku perkawinan sesuku.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Jorong Sikabau, Kabupaten Pasaman Barat, untuk memahami penerapan larangan kawin sesuku dalam masyarakat Minangkabau. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, kepala jorong, keluarga pelaku, dan masyarakat, serta dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder dari literatur dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang interaksi antara hukum adat dan hukum Islam terkait larangan perkawinan sesuku di wilayah tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Mengacu pada pendahuluan yang telah dipaparkan, penelitian ini diarahkan pada tiga aspek utama. Pertama, peneliti akan menganalisis proses penerapan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau di Jorong Sikabau, Kabupaten Pasaman Barat. Kedua, penelitian akan meneliti dampak atau implikasi yang terjadi apabila larangan tersebut dilanggar, baik dari segi hukum adat, ekonomi, maupun sosial. Ketiga, peneliti akan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan perkawinan sesuku di lingkungan masyarakat Minangkabau, dengan fokus pada Jorong Sikabau, sebagai berikut:

1) Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat

a) Adanya Aturan Adat Larangan Menikah Sesuku di Masyarakat Sikabau

Dalam adat Minangkabau, terdapat larangan keras menikah dengan orang yang satu suku atau satu kampung. Larangan ini didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan mengikuti ibu, sehingga sesama suku dianggap masih bersaudara. Tujuan utama larangan ini adalah untuk menghindari pernikahan sedarah dan menjaga kualitas keturunan. Pernikahan sesuku atau sekampung disebut sebagai "setali darah" dan dianggap melanggar adat. Sanksi bagi pelanggar sangat berat, seperti dikucilkan, diusir dari kampung, hingga dikenakan denda adat. Sanksi ini tidak hanya menimpa pasangan yang menikah, tetapi juga keluarga besarnya. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Larangan menikah sesuku masih dijunjung tinggi di Sikabau sesuai adat Minangkabau, namun kini mulai banyak dilanggar seiring perkembangan zaman dan meningkatnya pendidikan, sehingga kasus

perkawinan sesuku semakin sering terjadi. Meskipun larangan menikah sesuku masih dipegang dalam adat Minangkabau di Sikabau, pelanggaran terhadap aturan ini semakin sering terjadi akibat perubahan sosial dan masuknya pendatang, sehingga batas kekerabatan menjadi kabur. Contohnya, pernikahan sesuku antara Bapak Riswandi dan Ibu Massuarni di Jorong Sikabau menunjukkan bahwa praktik ini mulai diterima sebagian masyarakat, walaupun secara adat tetap dianggap pelanggaran meski sah menurut hukum negara.

Masyarakat Jorong Sikabau masih sangat memegang teguh adat Minangkabau, terutama larangan menikah sesuku yang didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal. Aturan eksogami matrilokal ini mewajibkan pernikahan dengan pasangan dari suku berbeda untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan mempererat hubungan sosial antarsuku, sehingga diharapkan memberi dampak positif bagi generasi mendatang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun larangan menikah sesuku masih menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Minangkabau di Sikabau, perubahan sosial yang terjadi telah membawa pengaruh besar terhadap pelaksanaan aturan adat tersebut. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih serius untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat agar tidak semakin tergerus oleh arus modernisasi dan globalisasi.

b) Pelanggaran larangan menikah sesuku makin sering terjadi, terutama di kalangan generasi muda.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun larangan menikah sesuku masih dihormati di Sikabau, sikap masyarakat mulai berubah seiring perkembangan zaman dan meningkatnya pendidikan. Di Jorong Sikabau, pernikahan sesuku kini semakin sering terjadi, terutama di kalangan generasi muda, akibat perubahan sosial dan masuknya pendatang yang membuat batas kekerabatan menjadi kurang jelas. Akibatnya, pernikahan sesuku antar nagari yang dulu dilarang kini mulai diterima.

Di era modern, larangan perkawinan sesuku di Nagari Jorong Sikabau mulai dipertanyakan, terutama oleh generasi muda yang terpengaruh globalisasi dan nilai individualisme. Mereka menilai aturan ini kurang relevan karena hubungan sesuku tidak selalu berarti hubungan biologis. Meski demikian, larangan ini tetap berakar pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, di mana satu suku

dianggap saudara sedarah sehingga pernikahan sesuku dipandang tabu dan melanggar norma adat.

Larangan kawin sesuku di Minangkabau bertujuan menjaga kemurnian keturunan, mencegah konflik, dan mempererat hubungan antar suku. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat berakibat pada sanksi sosial seperti pengucilan dan denda adat, sehingga keluarga selalu memeriksa asal suku sebelum pernikahan. Aturan ini bukan hanya norma, tetapi juga bagian dari sistem nilai yang menekankan kebersamaan, kekerabatan, dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat matrilineal. Pepatah "Samo suku bak adiak jo kakak, bak anak jo induak" menegaskan pentingnya menjaga batasan pernikahan sesuku sebagai bentuk penghormatan terhadap adat.(Destuliadi, 2022)

c) Wali Nagari Sikabau memperbolehkan pernikahan sesuku antar nagari karena kekerabatan lemah.

Wali Nagari Sikabau, Bapak Marwin, menyatakan bahwa pelanggaran larangan menikah sesuku kini semakin sering terjadi karena perubahan sosial dan banyaknya pendatang, sehingga batas kekerabatan menjadi kabur. Pernikahan sesuku antar nagari yang dulu dilarang kini mulai diterima, sementara pelanggaran dalam nagari tetap dikenai sanksi seperti membayar kambing, pengusiran, atau sanksi sosial lain, meskipun sebagian pelaku memilih membayar denda dan ada pula yang mengabaikannya. Menurut Datuak Tanasar, para pemuka adat sudah mengetahui latar belakang keluarga warga, sehingga aturan adat tetap diawasi meski pelanggaran meningkat.

Hukum adat Minangkabau adalah aturan turun-temurun yang mengatur kehidupan masyarakat, salah satunya melarang perkawinan sesuku. Larangan ini didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu sehingga sesama suku dianggap masih satu keluarga. Di Nagari Jorong Sikabau, perkawinan sesuku kini diperbolehkan asalkan disertai pembayaran denda adat, biasanya berupa seekor kambing. Hal ini berbeda dengan adat Minangkabau pada umumnya, yang melarang keras perkawinan sesuku dan memberikan sanksi tegas seperti denda, pengucilan, atau pengusiran dari komunitas.

Penelitian ini menemukan bahwa aturan adat di Jorong Sikabau lebih longgar dibandingkan adat Minangkabau umumnya, karena memperbolehkan perkawinan sesuku, baik antar warga nagari yang

sama maupun berbeda. Namun, pelanggaran tetap dikenai sanksi adat, sehingga nilai-nilai adat tetap dijaga meskipun ada pelonggaran aturan. Mayoritas masyarakat Sikabau juga masih memilih menikah dengan sesama warga Sikabau.

d) Sanksi terhadap Pelanggaran Pernikahan Sesuku

Pelaku kawin sesuku dikenai sanksi adat yang ditetapkan oleh datuak dan ninik mamak melalui musyawarah dengan orang tua pelaku. Umumnya, sanksi berupa denda seekor kambing yang diserahkan pada malam penutupan baralek. Kambing tersebut disembelih secara sakral oleh pemuka adat, hanya dihadiri oleh mereka sebagai simbol penyelesaian pelanggaran, dan kepala kambing dibagikan khusus kepada pemuka adat sebagai bentuk penghormatan, sementara masyarakat umum tidak diperbolehkan memakannya. (Putri, 2020)

Penyelesaian konflik adat Minangkabau dilakukan melalui mediasi dan musyawarah yang melibatkan tokoh adat seperti ninik mamak dan tuo kampuang. Dalam kasus perkawinan sesuku, mereka memberi nasihat agar larangan dipatuhi demi menjaga keharmonisan dan mencegah risiko genetik. Jika larangan dilanggar, pasangan dikenai sanksi adat berupa denda, permintaan maaf, pengucilan, atau penghapusan nama suku, demi menjaga nilai adat, kesehatan keturunan, dan stabilitas sosial. Secara ringkas, apabila pasangan tetap ingin menikah sesuku, mereka harus siap menghadapi konsekuensi berupa pengucilan, denda adat, dan pemutusan hubungan sosial, serta mengikuti proses penyelesaian melalui musyawarah adat. Hal ini menunjukkan bahwa adat Minangkabau sangat menjaga keseimbangan antara tradisi dan kehidupan sosial masyarakatnya.

2) Implikasi Baik Dari Segi Hukum, Ekonomi, dan Sosiologi Yang Timbul Terhadap Pasangan Yang Melanggar Larangan Perkawinan Sesuku Di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat

Aturan adat larangan perkawinan sesuku di Jorong Sikabau, Minangkabau, berperan penting menjaga keharmonisan sosial dan nilai budaya. Meski demikian, pelanggaran masih terjadi dan menimbulkan konsekuensi adat, hukum, ekonomi, dan sosial bagi pelaku. Hal ini menunjukkan dinamika sosial dan hukum adat yang masih kuat di masyarakat Jorong Sikabau.

a) Segi Hukum

Berdasarkan penelitian di Jorong Sikabau, larangan adat terhadap perkawinan sesuku masih dijunjung tinggi, meskipun terkadang

dilanggar. Pelaku yang melanggar wajib melapor dan menerima nasihat dari ninik mamak selama tiga hari sebelum menikah. Jika tetap melangsungkan pernikahan, mereka akan dikenai sanksi adat berupa denda kambing atau, meskipun jarang, pengusiran dari kampung. Tokoh adat memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum adat dan menentukan sanksi yang diberikan. Larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa perkawinan sesuku dapat menimbulkan risiko keturunan yang kurang baik, mempersempit pergaulan, dan merusak ikatan sosial dalam suku, sehingga aturan ini diwariskan secara turun-temurun demi menjaga kelangsungan adat.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara spesifik melarang perkawinan antar suku, sehingga secara hukum nasional perkawinan tersebut tetap sah. Negara mengakui keberadaan hukum adat, namun penerapannya terbatas pada wilayah masyarakat adat dan tidak berdampak langsung pada pengakuan formal negara. Dengan demikian, terdapat dualisme hukum dalam praktik perkawinan: hukum nasional mengakui perkawinan antar suku secara umum, sedangkan hukum adat mengatur lebih spesifik sesuai tradisi setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan sesuku lebih banyak diatur oleh norma adat daripada oleh hukum negara. (Rahmadiah et al., 2024)

b) Segi Ekonomi

Pasangan yang menikah sesuku akan dikucilkan dari suku dan masyarakat adat, sehingga kehilangan dukungan sosial dan ekonomi. Akibatnya, mereka sulit mengakses sumber daya dan peluang usaha yang biasanya didapat melalui jaringan kekerabatan di Minangkabau. Menurut beberapa narasumber, pelaku pelanggaran adat diwajibkan membayar denda berupa kambing. Denda ini sering menjadi beban ekonomi, bahkan memaksa pelaku berhutang. Pembayaran denda bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga syarat agar pelaku dapat diterima kembali oleh masyarakat. Seorang tokoh adat menegaskan bahwa pembayaran denda adalah langkah akhir untuk memulihkan hubungan sosial dan menyelesaikan pelanggaran adat.

Jenis sanksi yang diberikan masyarakat dan pemimpin adat kepada mereka yang melanggar adat istiadat. Pertama, Denda Satu Ekor Kambing atau Kerbau. Kedua, Denda Satu Ekor Singgang Ayam. Ketiga, Denda Sakampia Siriah dan Permintaan Maaf kepada Ninik Mamak.

Sanksi ini diberikan untuk pelanggaran ringan.

Berdasarkan temuan penelitian, sanksi adat larangan perkawinan sesuku di Minangkabau tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial dan menjaga norma adat. Namun, peneliti menekankan pentingnya memperhatikan dampak ekonomi agar sanksi tetap adil dan tidak terlalu memberatkan pelaku.

c) Segi Sosial

Di Jorong Sikabau, Minangkabau, pernikahan sesuku sangat dilarang karena dianggap melanggar adat. Orang tua menolaknya karena diyakini dapat memicu konflik keluarga, masalah ekonomi, dan stigma negatif di masyarakat. Dampak sosial dari pernikahan sesuku sangat besar, karena pasangan yang melanggar biasanya ditolak oleh keluarga, adat, dan masyarakat. Penolakan ini menyebabkan pengucilan sosial, stres, bahkan depresi. Masyarakat menganggap pernikahan sesuku melanggar norma, sehingga pasangan sering dikucilkan dan dibatasi interaksinya. Meskipun pengucilan tidak diatur dalam undang-undang khusus, hal ini merupakan sanksi sosial dan adat yang diterapkan sebagai konsekuensi pelanggaran norma.

Beberapa masyarakat memiliki hukum adat yang mengatur kehidupan mereka. Dalam adat Minangkabau, perkawinan sesuku dilarang karena dianggap merusak tatanan adat. Pelanggarnya akan dikenai sanksi adat, seperti pengucilan, karena dianggap menimbulkan masalah di masyarakat. Berikut ini adalah hukuman bagi pelanggar perkawinan terlarang tersebut. Pertama, Membatalkan perkawinan. Kedua, mengusir mereka dari Masyarakat. Ketiga, Memutus mereka dari adat dan Masyarakat. Keempat, mendenda mereka. (Dewi & Nizam, 2023)

Konflik akibat pelanggaran larangan ini sering memperburuk hubungan anak dan orang tua, bahkan bisa menyebabkan anak ditolak keluarga atau nekat kabur dari rumah. Untuk menyelesaikan konflik, biasanya ninik mamak atau pemimpin adat turun tangan memberi keputusan dan sanksi adat demi memulihkan keharmonisan keluarga. Pasangan yang menikah sesuku di Minangkabau tidak hanya menghadapi konflik keluarga, tetapi juga mendapat stigma negatif dari masyarakat. Meski sudah membayar denda adat, pandangan buruk tetap melekat dan sering menjadi bahan perbincangan yang bisa memicu perselisihan. Masyarakat percaya musibah yang menimpa pasangan sesuku adalah

akibat pelanggaran adat, sehingga kasus seperti ini dijadikan peringatan bagi yang lain. Larangan perkawinan sesuku pun dipandang penting untuk menjaga tatanan sosial, kepercayaan, dan nilai budaya masyarakat Minangkabau.

3) Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat

Perlu dipahami bahwa "melarang" menurut adat berbeda dengan "mengharamkan" menurut agama. Larangan adat tidak selalu berarti haram dalam agama. Misalnya, pernikahan sesuku dilarang dalam adat Minangkabau, tetapi diperbolehkan dalam Islam karena tidak termasuk mahram. Islam hanya mengharamkan pernikahan dengan mahram yang telah dijelaskan secara jelas. Dengan merujuk pada Surat An-Nisa ayat 23-34.

Secara singkat, hukum Islam hanya melarang pernikahan karena hubungan darah, susuan, dan semenda. Larangan ini tidak mencakup hubungan kekerabatan dari garis ibu seperti sesuku dalam adat Minangkabau. Dengan demikian, larangan adat Minangkabau terkait pernikahan sesuku berbeda dengan aturan dalam hukum Islam.

Larangan perkawinan dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu larangan abadi (haram ta'bîd) dan larangan sementara (haram gairu ta'bîd). Larangan abadi berarti seorang pria haram menikahi wanita tertentu untuk selamanya, sedangkan larangan sementara hanya berlaku dalam kondisi tertentu. Wanita yang termasuk dalam kategori larangan abadi disebut mahram. Para ulama sepakat bahwa larangan abadi ini meliputi tiga sebab utama: nasab (keturunan), persusuan (radha'ah), dan persemendaan (musaharah). Larangan karena nasab mencakup: ibu dan nenek ke atas, anak perempuan dan cucu ke bawah, saudara perempuan (kandung, seayah, atau seibu), bibi dari pihak ayah dan ibu, serta keponakan perempuan dari saudara laki-laki maupun perempuan. Larangan ini juga ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang melarang perkawinan antara orang yang berhubungan darah baik secara vertikal (atas-bawah) maupun horizontal (menyamping). Larangan karena persusuan berlaku jika seorang anak menyusu pada wanita lain sebelum usia dua tahun, sehingga terjalin hubungan mahram seperti ibu susuan, saudara sepersusuan, dan keponakan sepersusuan. Hukum ini didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits, yang menyamakan larangan persusuan dengan larangan

nasab. Larangan karena persemendaan mencakup mertua, anak tiri (jika sudah terjadi hubungan suami istri dengan ibunya), menantu, dan ibu tiri. Larangan ini berlaku karena adanya hubungan pernikahan yang sah, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, UU Perkawinan, dan KHI. (Agus Hermanto, 2017)

Pernikahan sesuku sebenarnya diperbolehkan karena tidak termasuk mahram, namun hal ini masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. Dalam praktik perwalian pernikahan menurut mazhab Syafi'i di Indonesia, urutan wali dimulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, hingga hakim. Perlu dipahami bahwa adat Minangkabau melarang pernikahan sesuku, sedangkan dalam Islam tidak ada aturan khusus yang melarangnya. Hukum Islam hanya mensyaratkan persetujuan kedua mempelai, mahar, dan syarat-syarat agama lainnya, tanpa mempertimbangkan suku atau garis keturunan. Sebagian ulama juga berpendapat tidak ada dalil agama yang melarang pernikahan sesuku, selama tidak melanggar larangan menikahi mahram dan tetap sesuai prinsip-prinsip Islam. Jadi, menurut Islam, pernikahan sesuku tetap sah selama memenuhi syarat agama.

Syarat sah pernikahan dalam Islam adalah adanya suami, istri, wali, dua saksi laki-laki Muslim yang dewasa, dan ijab qabul yang jelas. Tidak ada aturan dalam syariat Islam yang melarang pernikahan sesuku, sehingga larangan menikah sesuku bukan bagian dari rukun dan syarat pernikahan menurut Islam. Larangan menikah dalam Islam diatur dalam Surat An-Nisa ayat 23 dan 24, yang menetapkan siapa saja yang haram dinikahi. Jadi, batasan pernikahan menurut Islam didasarkan pada syariat, bukan aturan adat. Selama tidak melanggar ketentuan mahram, pernikahan sesuku diperbolehkan dalam Islam. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi konflik antara aturan agama dan adat.

Dalam masyarakat Minangkabau, larangan menikah sesuku adalah bagian dari *urf* atau kebiasaan adat yang kuat dan menjadi norma sosial yang mengikat. Adat ini melarang pernikahan antar anggota suku atau marga yang sama karena dapat mengganggu tatanan sosial dan persatuan nagari. Larangan tersebut berlandaskan sistem eksogami matrilineal, di mana keturunan mengikuti garis ibu, sehingga pernikahan sesuku dianggap tabu dan dilarang. Larangan menikah sesuku dalam adat Minangkabau termasuk *urf shahih* yang dijalankan turun-temurun. Larangan ini sejalan dengan prinsip *saddu al-dzariah* dalam hukum Islam yang mencegah kerusakan sosial. (Maret, 2024)

D. Simpulan

Adat Minangkabau melarang pernikahan sesuku karena dianggap satu darah dalam sistem matrilineal, bertujuan menjaga kemurnian keturunan dan memperkuat hubungan sosial. Di Nagari Jorong Sikabau, larangan ini masih dihormati, namun pelanggaran makin sering terjadi terutama di kalangan muda akibat perubahan sosial, pendatang, dan pendidikan yang makin tinggi. Masyarakat dan pemuka adat tetap menegakkan aturan dengan toleransi terbatas, terutama untuk sesuku antar nagari yang dianggap kekerabatannya lemah. Pelanggaran dikenai sanksi adat seperti denda, pengucilan, atau pemutusan hubungan adat, diselesaikan melalui musyawarah adat untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas masyarakat. Meski aturan ini penting, modernisasi menuntut adaptasi dan pelestarian nilai adat secara berkelanjutan.

Larangan pernikahan sesuku di adat Minangkabau, khususnya Jorong Sikabau, masih dihormati meski sering dilanggar dan dikenai sanksi adat seperti denda atau pengusiran. Secara hukum nasional, pernikahan antar suku sah karena tidak dilarang UU No. 1/1974, namun pelaksanaannya diatur oleh hukum adat yang berlaku lokal. Dengan demikian, pernikahan antar suku diakui secara nasional tetapi diatur dan disanksi sesuai adat setempat. Pelaku pernikahan sesuku dalam adat Minangkabau mengalami pengucilan sosial yang berdampak pada hilangnya dukungan ekonomi dan jaringan sosial penting. Mereka diwajibkan membayar denda berupa kambing, kerbau, atau denda lain sesuai tingkat pelanggaran, yang menjadi syarat untuk diterima kembali dalam masyarakat. Namun, beban ekonomi akibat denda sering memberatkan pelaku, sehingga diperlukan perhatian agar sanksi adat tetap adil dan tidak membebani secara berlebihan. Di Minangkabau, khususnya Jorong Sikabau, pernikahan sesuku dianggap pelanggaran adat serius yang menyebabkan konflik sosial, penolakan, dan stigma buruk.

Terdapat perbedaan antara larangan adat dan agama terkait pernikahan sesuku. Dalam Islam, pernikahan sesuku diperbolehkan selama tidak melanggar batas mahram sesuai Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23-24. Islam melarang menikah dengan kerabat dekat berdasarkan nasab, susuan, dan mushaharah, namun tidak secara khusus melarang sesuku seperti adat Minangkabau. Sedangkan adat Minangkabau melarangnya berdasarkan sistem matrilineal untuk menjaga keharmonisan sosial dan budaya. Pelanggar adat mendapat sanksi pengucilan atau pengusiran. Dengan demikian, pernikahan sesuku sah secara Islam, tetapi dilarang dalam adat Minangkabau sebagai bentuk kearifan lokal. Dalam masyarakat Minangkabau, larangan menikah sesuku adalah bagian

dari *urf* atau kebiasaan adat yang kuat dan menjadi norma sosial yang mengikat. Larangan menikah sesuku dalam adat Minangkabau termasuk *urf shahih* yang dijalankan turun-temurun. Larangan ini sejalan dengan prinsip *saddu al-dzariah* dalam hukum Islam yang mencegah kerusakan sosial.

Daftar Rujukan

Agus Hermanto. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih DanRelevansinya Dengan Hukum PerkawinanDi Indonesia. *Muslim Heritage*, *2*(1), 125–152.

Destuliadi, D. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, *3*(1), 27–34. https://doi.org/10.31539/ijoce.v3i1.6632

Dewi, N., & Nizam, A. (2023). Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Adab Dan Dakwah IAIN Kerinci*, *1*(2), 49.

Herviani, F. (2019). Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu Al-Dzari'ah : Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang. *Sakina : Journal of Family Studies*, *3*(2), 2. http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/282

Malik, R. (2018). Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau Dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau Di Perantauan Sebagai Wujud Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *5*(2). https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18102

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *1*(1), 22–28. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97

Maret, V. N. (2024). *Al-Usariyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*

Putri, D. (2020). Pemberian Sanksi terhadap Masyarakat yang Melanggar Adat dalam Perkawinan Studi Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. *Jurnal Sosiologi Andalas*, *6*(1), 56–69. https://doi.org/10.25077/jsa.6.1.56-69.2020

Rahmadiah, N., F, M. W. F., & Kalijaga, U. I. N. S. (2024). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Perkawinan Sasuku : Instrument Budaya Dalam Kajian Hukum Nasional*. *7*(1), 980–987. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.910.Sasuku

Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqra'*, *5*(1), 76.

Agus Hermanto. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih DanRelevansinya Dengan Hukum PerkawinanDi Indonesia. *Muslim Heritage*, *2*(1), 125–152.

Destuliadi, D. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, *3*(1), 27–34. https://doi.org/10.31539/ijoce.v3i1.6632

Dewi, N., & Nizam, A. (2023). Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Adab Dan Dakwah IAIN Kerinci*, *1*(2), 49.

Herviani, F. (2019). Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu Al-Dzari'ah : Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang. *Sakina : Journal of Family Studies*, *3*(2), 2. http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/282

Malik, R. (2018). Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau Dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau Di Perantauan Sebagai Wujud Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *5*(2). https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18102

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *1*(1), 22–28. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97

Putri, D. (2020). Pemberian Sanksi terhadap Masyarakat yang Melanggar Adat dalam Perkawinan Studi Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. *Jurnal Sosiologi Andalas*, *6*(1), 56–69. https://doi.org/10.25077/jsa.6.1.56-69.2020

Rahmadiah, N., F, M. W. F., & Kalijaga, U. I. N. S. (2024). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Perkawinan Sasuku : Instrument Budaya Dalam Kajian Hukum Nasional*. *7*(1), 980–987. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.910.Sasuku

Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqra'*, *5*(1), 76.